



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, PEMUDA
DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja (Fisik dan Virtual)
Dengan	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.
Hari/Tanggal	: Kamis, 23 September 2021.
Pukul	: 09.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Syaiful Huda/ Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Permasalahan dan Perkembangan Seleksi 1 Juta PPPK; dan 2. Penyesuaian RKA-K/L dan RKP TA 2022 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
Hadir Komisi X DPR RI	: 36 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Nadiem Anwar Makarim, Mendikbud RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI secara fisik dan virtual dibuka pada pukul 09.20 WIB oleh Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbudristek RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Perkembangan Seleksi 1 Juta PPPK

Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk sungguh-sungguh memperhatikan pendapat, aspirasi dan masukan dari Komisi X DPR RI sebagai berikut:

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk merumuskan transisi kebijakan bagi peserta seleksi PPPK yang memiliki keterbatasan menggunakan perangkat IT dalam seleksi dan untuk memperbaiki proses seleksi yang ada.
2. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk memberikan tambahan nilai/afirmasi pada nilai kompetensi teknis dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. usia;
 - b. lama pengabdian;
 - c. afirmasi khusus bagi penyandang disabilitas; dan
 - d. daerah tertentu (antara lain, daerah 3T, daerah pasca bencana, dan daerah konflik)
3. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbusristek RI untuk memaksimalkan kesempatan pemilihan formasi yang masih kosong kepada pelamar/guru honorer untuk mengikuti seleksi tahap II dan tahap III Tahun 2021.
4. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbusristek RI untuk menunda pengumuman hasil seleksi guru PPPK tahap I tahun 2021 yang rencananya akan diumumkan pada tanggal 24 September 2021. Penundaan diperlukan agar Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Pansel untuk memperbaiki kebijakan khususnya mengenai tambahan/kenaikan afirmasi.
5. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk membuat skema bantuan tes swab antigen bagi guru honorer yang mengikuti ujian seleksi PPPK untuk jabatan fungsional guru.
6. Komisi X DPR RI dan Mendikbudristek RI sepakat akan menjadwalkan rapat kerja dengan K/L terkait untuk mengetahui tindak lanjut keputusan rapat kerja hari ini mengenai permasalahan seleksi PPPK tahap I untuk jabatan fungsional guru, paling lambat sebelum tanggal 6 Oktober 2021.

B. Penyesuaian RKA/KL dan RKP TA 2022 sesuai Banggar DPR RI

2. Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf c UU No. 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan berdasarkan Surat Ketua Badan Anggaran DPR RI Nomor AG/12436/DPR-RI/IX/2021 tertanggal 16 September 2021, Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Definitif Kemendikbudristek RI pada RAPBN TA 2022 sebesar **Rp72.994.908.331.000,-** (*Tujuh puluh dua triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Eselon I (dalam ribuan rupiah)

No	Unit Utama	Pagu Anggaran TA 2022	Pagu Anggaran TA 2022 (hasil penyesuaian)
1	Sekretariat Jenderal	31.803.308.784	31.803.308.784
2	Inspektorat Jenderal	179.375.299	179.375.299
3	Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	2.059.169.324	2.059.169.324
4	Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BASKAP)	521.665.152	532.818.547
5	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	403.348.485	403.348.485
6	Ditjen Kebudayaan	1.273.732.381	1.273.732.381
7	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	1.954.835.217	1.954.835.217
8	Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	29.300.468.037	29.300.468.037
9	Ditjen Pendidikan Vokasi	5.499.005.652	5.487.852.257
	Jumlah	72.994.908.331	72.994.908.331

Berdasarkan Program (dalam ribuan rupiah)

No	Program	Pagu Anggaran TA 2022 (nota keuangan)	Pagu Anggaran TA 2022 (hasil penyesuaian)
1	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	10.172.463.297	10.139.195.732
2	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	705.222.791	705.222.791
3	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	11.395.036.817	11.439.457.777
4	Program Pendidikan Tinggi	28.646.007.592	28.646.007.592
5	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.072.735.855	3.061.582.460
6	Program Dukungan Manajemen	19.003.441.979	19.003.441.979
	Jumlah	72.994.908.331	72.994.908.331

2. Komisi X DPR RI menyetujui usulan pergeseran anggaran dari Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi ke Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran sebesar Rp.11.153.395.000,- (*sebelas miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*). Selanjutnya, Komisi X DPR RI mengharapkan Kemendikbudristek RI untuk segera menyampaikan surat resmi usulan tersebut kepada Komisi X DPR RI paling lambat tanggal 24 September 2021.

3. Dalam rangka pengawasan sesuai Pasal 227 ayat (3) UU. No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Komisi X DPR RI meminta Kemendikbudristek RI untuk menyerahkan bahan tertulis mengenai RKA/KL TA 2022 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah UU Tentang APBN TA 2022 ditetapkan di Rapat Paripurna DPR RI.
4. Komisi X DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat bahwa program-program strategis nasional dan program-program yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, akan dilaksanakan oleh Kemendikbudristek RI dengan memperhatikan saran, pandangan, dan usulan anggota Komisi X DPR RI sesuai pembahasan RAPBN TA 2022 yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.55 WIB

**MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN RI**



Nadiem Anwar Makarim

KETUA RAPAT,



Syaiful Huda